

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat konstitusional yang menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar sekolah mampu menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara mandiri melalui proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar (PPEPP). Dengan demikian, kebijakan ini menuntut satuan pendidikan, termasuk sekolah dasar, untuk tidak hanya menjalankan proses administratif, tetapi juga benar-benar membangun budaya mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Darwin dan Irsan (2012), penjaminan mutu pendidikan merupakan proses transformasi yang terencana dan sistematis dalam penetapan serta pemenuhan seperangkat standar mutu yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, baik secara internal maupun eksternal. Sementara itu, Edward (2012) mendefinisikan penjaminan mutu sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Dalam konteks satuan pendidikan dasar, implementasi SPMI berfungsi sebagai mekanisme internal sekolah untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran, pengelolaan, dan layanan pendidikan mencapai mutu yang diharapkan. Siklus PPEPP yang menjadi inti dari SPMI berperan sebagai pendekatan manajemen mutu berkelanjutan yang menuntut sekolah untuk melakukan perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) terhadap seluruh proses pendidikan.

Lebih jauh lagi, Sutrisno (2019) menambahkan bahwa implementasi SPMI harus dijalankan melalui siklus PPEPP secara konsisten untuk

menciptakan budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa. SPMI bukan sekadar instrumen administratif, melainkan strategi manajerial yang menumbuhkan budaya reflektif di sekolah. Penerapannya menuntut kepala sekolah dan guru untuk mampu mengembangkan sistem kerja berbasis data, melakukan evaluasi diri, serta melaksanakan tindak lanjut secara terukur. Melalui siklus PPEPP, setiap sekolah didorong untuk mengenali kekuatan yang dimiliki, memetakan kelemahan, serta menetapkan prioritas perbaikan mutu. Dengan demikian, pelaksanaan SPMI sejatinya merupakan upaya strategis dalam membangun sekolah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) yang berorientasi pada peningkatan kinerja guru dan hasil belajar siswa.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, mekanisme evaluasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan mengalami perubahan. Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang sebelumnya digunakan sebagai instrumen utama pemetaan mutu, kini telah digantikan oleh Rapor Pendidikan sebagai instrumen resmi evaluasi mutu pendidikan. Rapor Pendidikan menyajikan data komprehensif berbasis hasil Asesmen Nasional, survei karakter, survei lingkungan belajar, serta data administrasi pendidikan yang terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, Rapor Pendidikan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan pengambilan keputusan strategis sekolah dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), khususnya pada tahap evaluasi dan pengendalian mutu.

Meskipun kebijakan dan konsep SPMI telah jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan dan implementasi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa banyak sekolah dasar belum mampu mengoperasionalkan SPMI secara utuh dan bermakna. Pelaksanaan masih sebatas pemenuhan dokumen administratif tanpa diikuti refleksi kritis terhadap kebutuhan mutu sekolah. Misalnya, pada tahap penetapan standar, sebagian sekolah belum menyusun standar mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu dan kebutuhan nyata. Pada tahap pelaksanaan standar, kegiatan pembelajaran sering kali belum terintegrasi dengan standar mutu yang telah

disusun. Tahap evaluasi dan pengendalian mutu pun kerap dilakukan secara formalitas tanpa tindak lanjut berbasis data. Akibatnya, tujuan utama SPMI, yaitu peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran, belum tercapai secara optimal. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa implementasi SPMI di sekolah dasar masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kompetensi, budaya kerja, maupun dukungan sistem manajemen sekolah.

Pelaksanaan SPMI yang belum optimal dapat ditelusuri dari beberapa aspek penting. Pertama, pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap konsep PPEPP masih terbatas, sehingga pelaksanaannya cenderung berorientasi pada pemenuhan laporan daripada pengembangan mutu secara substantif. Kedua, supervisi akademik dan pembinaan kepala sekolah belum sepenuhnya berfokus pada penguatan budaya mutu, melainkan masih dominan bersifat kontrol administratif. Ketiga, keterbatasan data mutu yang akurat serta kurangnya analisis reflektif menghambat proses evaluasi dan peningkatan standar secara berkelanjutan. Keempat, budaya reflektif dan kolaboratif di kalangan guru masih rendah, sehingga upaya peningkatan mutu pembelajaran belum terwujud secara kolektif. Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan sumber daya dan minimnya pelatihan yang relevan dalam mendukung pelaksanaan SPMI secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Mardhiyah, Ade Saputra, Dewi Wulandari Fahrezi, Salfen Hasri, dan Sohiron (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar* menemukan bahwa pelaksanaan SPMI di sekolah dasar belum berjalan secara menyeluruh. Banyak sekolah masih melaksanakan kegiatan mutu secara administratif dan parsial, belum sepenuhnya memahami prinsip PPEPP sebagai siklus peningkatan mutu berkelanjutan. Hambatan utama ditemukan pada aspek pemahaman, keterbatasan sarana, serta dukungan manajerial yang belum optimal. Penelitian lain oleh Pujiyanto, Yasir Arafat, dan Andi Arif Setiawan (2020) berjudul *Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Lingkungan*

Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Air Salek menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan yang berkelanjutan dan lingkungan kerja yang kondusif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme guru dan efektivitas implementasi mutu pendidikan di sekolah dasar.

Selanjutnya, penelitian oleh Iriyana, Sutisna, dan Mamay Komarudin (2021) dalam karya *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Pulomerak* menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi akademik memiliki pengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap peningkatan kinerja guru. Temuan ini memperkuat bahwa fungsi manajerial kepala sekolah menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMI dalam konteks peningkatan mutu guru dan pembelajaran

Penelitian terkini oleh Mohamad Amin Rohman, Subadio, dan Yayat Ruhiat (2024) berjudul *Pengaruh Supervisi Akademik dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Guru* juga menegaskan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara keterlibatan kepala sekolah dalam supervisi akademik dengan peningkatan mutu pembelajaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama implementasi SPMI di sekolah dasar tidak hanya terletak pada pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan manajemen mutu yang konsisten dan keterlibatan aktif kepala sekolah serta guru dalam siklus PPEPP. Temuan-temuan ini memperkuat relevansi penelitian tentang implementasi SPMI dalam meningkatkan kinerja guru sekolah dasar sebagai upaya strategis menuju budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Penerapan SPMI di sekolah dasar merupakan isu yang sangat relevan dan signifikan dalam konteks transformasi pendidikan nasional, khususnya di era

Kurikulum Merdeka. Kinerja guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kurikulum tersebut. Oleh karena itu, SPMI berperan strategis dalam membangun sistem internal sekolah yang mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Masalah implementasi SPMI yang belum optimal berimplikasi langsung terhadap rendahnya mutu pembelajaran, ketercapaian Dimensi Profil Lulusan, serta keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dengan demikian, isu ini sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Selain itu, implementasi SPMI yang efektif tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja guru, tetapi juga memperkuat akuntabilitas sekolah di hadapan masyarakat dan pemerintah. Melalui mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang transparan, sekolah dapat menunjukkan capaian kinerjanya secara objektif, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi SPMI menjadi sangat bermakna karena berkontribusi pada penguatan tata kelola sekolah yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Masalah implementasi SPMI dalam meningkatkan kinerja guru memiliki makna penting dan mendesak untuk diselesaikan karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan dasar. Diperlukan model implementasi SPMI yang lebih kontekstual dan aplikatif, disertai dengan penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam memahami serta menjalankan siklus PPEPP secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis, yaitu memperkaya kajian tentang manajemen mutu pendidikan di sekolah dasar, sekaligus menawarkan solusi implementatif untuk memperkuat budaya mutu dan meningkatkan kinerja guru secara berkelanjutan.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Akar masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah dasar. Meskipun kebijakan ini telah diatur secara jelas melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar

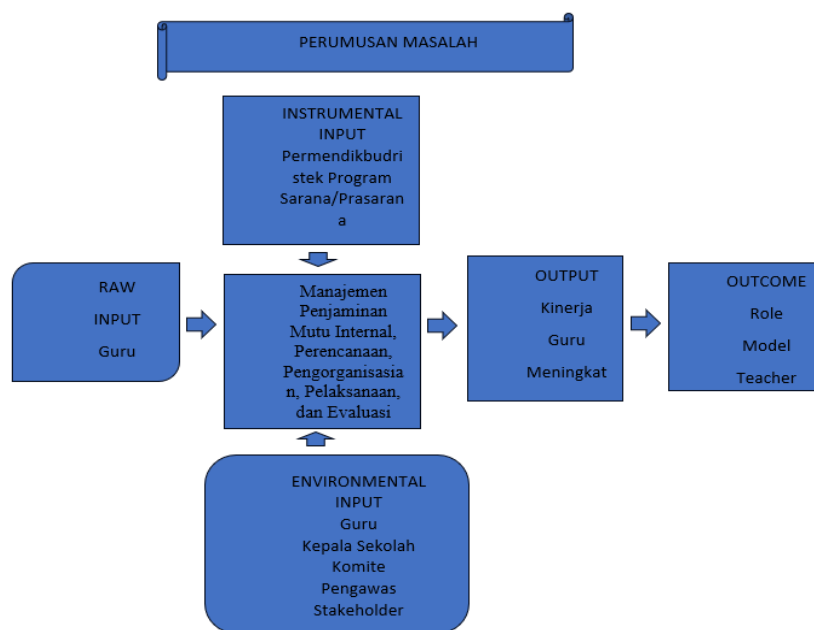
dan Menengah, implementasinya di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, banyak sekolah melaksanakan SPMI hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tanpa diikuti oleh proses refleksi mendalam, analisis berbasis data, maupun tindak lanjut yang terarah pada peningkatan mutu pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi SPMI sebagai sistem penggerak peningkatan mutu guru dan proses pembelajaran belum berjalan efektif. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, yang menandakan bahwa budaya mutu belum sepenuhnya tertanam dalam tata kelola sekolah maupun dalam perilaku profesional tenaga pendidik.

Penyebab munculnya permasalahan tersebut dapat ditelusuri dari berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain :

- a. Pemahaman kepala sekolah dan guru terhadap konsep serta mekanisme PPEPP masih terbatas, sehingga pelaksanaan SPMI lebih berorientasi pada penyusunan laporan administratif daripada pengembangan mutu pendidikan secara substansial.
- b. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah belum berfokus pada pembinaan dan penguatan budaya mutu, melainkan masih dominan bersifat kontrol dan pemantauan kepatuhan terhadap administrasi.
- c. Ketersediaan dan pemanfaatan data mutu pendidikan masih rendah, sehingga proses evaluasi dan tindak lanjut belum berbasis pada analisis yang objektif dan terukur.
- d. Budaya reflektif dan kolaboratif di kalangan guru belum terbentuk secara kuat, sehingga kegiatan peningkatan mutu pembelajaran belum dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan.
- e. Minimnya pelatihan dan pendampingan yang relevan bagi kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan SPMI secara efektif menyebabkan rendahnya kemampuan mereka dalam menjalankan siklus PPEPP secara menyeluruh.

- f. Kepemimpinan kepala sekolah belum optimal dalam menggerakkan sistem penjaminan mutu di sekolah, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan.
- g. Keterbatasan sumber daya dan dukungan manajerial dari berbagai pihak juga menjadi kendala dalam menciptakan sistem mutu yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kinerja guru.

Terkait dengan itu, peneliti menggambarkan masalah tersebut sebagai berikut :



Gambar 11. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah yang bermuara pada fokus penelitian tentang manajemen sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan kinerja guru berdasarkan studi analisis di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung Kabupaten Purwakarta. Penjelasan rumusan masalah penelitian sesuai gambar diatas bermakna bahwa komponen raw input bersama komponen instrumental input dan eviromental unput digunakan sebatas bermakna bahwa komponen raw input bersama komponen instrumental input dan eviromental input digunakan sebagai bahan masukan untuk diolah bersama dengan proses manajemen sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan akan mengeluarkan output meningkatkan kinerja guru. Apabila keluaran

output dan hasil outcome belum sesuai dengan yang diharapkan maka hal ini menjadi umpan balik atau feedback untuk mengulangi ke raw input untuk proses perbaikan dalam manajemen sistem penjaminan mutu internal. Proses ini berlangsung secara terus menerus demi meningkatkan kinerja guru, dengan penjelasan isi dari tiap komponen.

1. Komponen Input

Komponen ini terdiri dari Instrumental Input, Raw Input, dan Environmental Input. Dimana raw input adalah siswa, Instrumental input berisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.. Sedangkan environmental input meliputi lingkungan dan elemen sekolah yang berada bersama siswa seperti kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, dan stakeholder atau pengambil kebijakan lainnya.

2. Komponen Proses

Komponen ini merupakan pengolahan manajemen sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Komponen Output

Komponen ini adalah keluaran dari proses yang telah dilaksanakan manajemen sistem penjaminan mutu internal yaitu meningkatnya kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung. Peningkatan kinerja guru tersebut tercermin dalam kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai standar mutu, melaksanakan pembelajaran secara efektif dan berorientasi pada kebutuhan siswa, melaksanakan evaluasi pembelajaran secara objektif dan reflektif, serta berpartisipasi aktif dalam siklus penjaminan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

4. Komponen Outcome

Komponen ini merupakan hasil akhir yaitu terbangunnya budaya mutu dan profesionalisme guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung. Budaya mutu tersebut ditandai dengan meningkatnya kesadaran guru

terhadap pentingnya standar mutu pembelajaran, konsistensi pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta terbentuknya praktik perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah.

Peningkatan mutu Pendidikan merupakan tanggung jawab Bersama, yang melibatkan berbagai komponen baik dari kebijakan, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja. Guru memainkan peran penting sebagai pelaksana proses pembelajaran dan penggerak perubahan di lingkungan pendidikan. Namun, tanpa sistem yang mendukung secara menyeluruh, kualitas kinerja guru tidak dapat ditingkatkan secara instan.

Perumusan masalah berdasarkan gambar menjelaskan bahwa peningkatan focus utama penelitian ini adalah menganalisis Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung untuk meningkatkan Kinerja Guru.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, peneliti membatasi fokus kajian hanya pada aspek-aspek implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung yang mencakup empat tahapan utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun rincian indikator dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung, meliputi:
 1. Landasan standar mutu yang digunakan.
 2. Tujuan mutu pembelajaran yang ingin dicapai.
 3. Konten standar pembelajaran yang dikembangkan.
 4. Media pendukung pembelajaran yang dimanfaatkan.
 5. Metode pembelajaran yang diterapkan.

6. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pelaksanaan SPMI.
 7. Sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan mutu.
 8. Lokasi atau konteks implementasi SPMI.
 9. Langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan SPMI.
 10. Pembiayaan yang diperlukan dalam proses perencanaan mutu.
- b. Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung, meliputi:
 1. Struktur organisasi pelaksana mutu di sekolah.
 2. Pembagian peran antar anggota tim mutu.
 3. Perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
 - c. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung, meliputi:
 1. Kegiatan awal dalam pelaksanaan SPMI.
 2. Kegiatan inti yang berkaitan dengan pelaksanaan standar mutu.
 3. Kegiatan penutup yang mencakup refleksi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan.
 - d. Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung, meliputi:
 1. Landasan pelaksanaan evaluasi SPMI.
 2. Tujuan evaluasi SPMI.
 3. Aspek atau konten yang dievaluasi dalam SPMI.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen SPMI dalam meningkatkan kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan SPMI dalam meningkatkan kinerja guru.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengorganisasian SPMI dalam meningkatkan kinerja guru.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan SPMI dalam meningkatkan kinerja guru.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi dan pengendalian SPMI dalam meningkatkan kinerja guru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik manajemen mutu pendidikan, khususnya dalam konteks penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah dasar sebagai strategi peningkatan kinerja guru dan mutu pembelajaran.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Kepala Sekolah:

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas manajemen mutu sekolah dan mengoptimalkan fungsi SPMI sebagai alat penggerak budaya mutu.

2. Bagi Guru:

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pelaksanaan SPMI dalam meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru.

3. Bagi Tim Penjamin Mutu Sekolah:

Menjadi acuan dalam memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian mutu di lingkungan sekolah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menjadi referensi atau dasar bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada implementasi SPMI dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar.

D. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung?
- b. Bagaimana pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung?
- c. Bagaimana pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung?
- d. Bagaimana evaluasi dan pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan kinerja guru di SDN Cilegong dan SDN 1 Cikaobandung?